

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memberlakukan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang – Undang tersebut tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- 1.Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- 2.Pengembangan kehidupan demokrasi.
- 3.Keadilan nasional.
- 4.Pemerataan wilayah daerah.
- 5.Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- 6.Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- 7.Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sejak berlakunya otonomi daerah, pajak menjadi sumber penghasilan yang sangat potensial. Sebagai sumber penghasilan yang utama, maka pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintah. Manfaat pajak dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari – hari pada beberapa sektor seperti, fasilitas kesehatan, transportasi, Pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain – lainnya. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah))

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan pada pemerintah daerah, diantaranya:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walle

Keseluruhan penerimaan pajak di atas sangatlah berperan penting bagi pendapatan pajak di Daerah Kabupaten Semarang, penerimaan atau pemungutan tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Sehingga diharapkan kecamatan maupun instansi mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya pajak reklame.

Tabel 1.1 menunjukkan data Penerimaan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2015 sampai dengan 2018

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 – 2018**

| TAHUN       | PAJAK DAERAH<br>(Rp) | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH<br>(Rp) | KONTRIBUSI PAJAK<br>DAERAH TERHADAP<br>PAJAK ASLI DAERAH<br>(%) |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>2015</b> | 68.925.358.883       | 251.414.225.435                   | 27,4  |
| <b>2016</b> | 105.768.321.555      | 318.536.051.176                   | 33,2  |
| <b>2017</b> | 168.523.226.446      | 417.417.848.830.80                | 40,4  |
| <b>2018</b> | 152.116.927.005      | 378.839.286.362.6                 | 40,2  |

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang

Pajak reklame bisa menjadi salah satu pendapatan yang memiliki potensial tinggi dalam meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Semarang karena setiap tempat usaha banyak yang menggunakan reklame untuk menarik konsumen,. Akan tetapi, dalam melakukan pemungutan pajak reklame, pemerintah daerah banyak menemui kendala-kendala atau hambatan.

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang

Tabel 1.2 menunjukkan data dan realisasi pajak Reklame Kabupaten Semarang tahun 2015 sampai dengan 2018

**Tabel 1.2**  
**Data dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Semarang Tahun 2015 – 2018**

| Tahun         | Target                  | Realisasi               |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 2015          | Rp 1.418.124.000        | Rp 1.646.028.655        |
| 2016          | Rp 1.550.000.000        | Rp 1.857.981.937        |
| 2017          | Rp 1.953.350.000        | Rp 1.958.469.704        |
| 2018          | Rp 2.055.000.000        | Rp 1.808.764.051        |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 6.976.474.000</b> | <b>Rp 7.271.244.347</b> |

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang

Berdasar Latar Belakang tersebut, maka Tugas Akhir ini mengangkat judul Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Reklame (Studi Pajak Reklame di Kabupaten Semarang).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan pokok permasalahannya dalam tugas akhir ini yaitu:

1. Mengapa penerimaan pajak reklame daerah Kabupaten Semarang rendah?
2. Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendorong penerimaan pajak reklame?
3. Apakah terdapat evaluasi terhadap usaha dalam mendorong penerimaan pajak reklame?

### **1.3 Tujuan**

1. Mengetahui penyebab rendahnya pajak reklame di Kabupaten Semarang
2. Mengetahui cara dan mekanisme Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menentukan target penerimaan pajak reklame
3. Mengetahui jenis - jenis upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame
4. Mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap upaya untuk mendorong penerimaan pajak reklame

### **1.4 Manfaat**

1. Bagi Kabupaten Semarang yaitu sebagai pedoman untuk mengoptimalkan pendapatan pajak reklame dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak reklame
2. Bagi Akademisi yaitu untuk menambah pengetahuan tentang pajak reklame.
3. Bagi Wajib Pajak yaitu supaya WP mengetahui hak dan kewajibannya sehingga WP tidak akan kena masalah hukum terkait perpajakan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi keseluruhan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam Bab I menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga menjadi suatu pedoman untuk mendukung pokok permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Bab III menyajikan tentang gambaran umum dari BKUD Kabupaten Semarang yang digunakan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimana menjelaskan tentang visi misi serta tugas BKUD. Bab ini juga menyajikan mengenai metode penelitian yang mencakup beberapa hal mengenai pengambilan data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab IV berisi tentang analisis dan pembahasan permasalahan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab V berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan penelitian sehingga akan ditemukan solusi untuk penelitian berikutnya.

